

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stichting voor Culture Samenwerking (Sticusa) merupakan sebuah yayasan kerja sama budaya yang dibentuk oleh Belanda dengan tujuan untuk melakukan pertukaran kebudayaan dengan berbagai negara yang tergabung di dalamnya seperti Belanda, Suriname, Antillen, dan Indonesia berdiri di Amsterdam pada bulan Februari 1948.¹ Posisi Belanda secara geografis, administrasi, dan sejarahnya dapat dianggap sebagai perwakilan Barat yang mampu membawa pengaruh penting dan besar terutama dalam bidang kebudayaan di berbagai negara yang telah dijamahnya. Verhoeven memberatkan 2 poin penting berdirinya Yayasan ini, yaitu adanya sejarah Panjang antara Belanda dan berbagai negara yang kemudian akan menjalin kerja sama dengan yayasan ini serta menganggap bahwa Belanda memiliki posisi penting di Barat yang membawa tugas penting pada penyebaran kebudayaan barat.² Atas dasar hal tersebutlah Verhoeven melaksanakan tugasnya sebagai direktur Sticusa dengan mencoba menjalin kerja sama dengan Indonesia, Suriname, dan Antillen. Verhoven melakukan diplomasi dengan tujuan pendirian cabang Sticusa di Indonesia.

¹ Bob Christian Molenberg. *Chance, Change, and the Sticusa On the Nature of Modern Europe*. Utrecht University. 2017. Hlm 5

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. NIT.



Frans Rijndert Johan Verhoeven lahir di Magelang (yang pada saat itu merupakan Hindia Belanda) pada tanggal 22 Oktober 1905 yang merupakan keturunan Belanda. Verhoeven atau yang biasa disapa Bob merupakan salah satu orang Belanda yang berspesialisasi pada Sejarah Indonesia. Ia belajar Indologi di Universitas Leiden pada tahun 1924-1930. Ia bekerja di beberapa posisi penting seperti Direktur Arsip Nasional Hindia Belanda, Penasehat senior UNESCO, penasehat senior penyebar informasi komisi PBB, sejarawan media baru, Direktur Yayasan Kerja Sama Kebudayaan (*Sticusa*) dan lain sebagainya. Verhoeven memiliki peran penting terutama dalam menjalin hubungan kerja sama kebudayaan antara Indonesia, Suriname, Antillen, dan Belanda. Sebagai direktur utama Stichting Culture voor Samenwerking (*Sticusa*) ia bertanggung jawab penuh atas jalinan kerja sama kebudayaan yang menjadi salah satu organ penting dalam penyebaran dan pemajuan kebudayaan diantara beberapa negara yang terhubung.³

Sticusa mengirim seseorang sebagai perwakilan dengan tujuan menghubungkan pemerintah Indonesia yang pada saat baru saja merasakan kemerdekaannya. Sticusa mengirim seorang mantan jurnalis di *The Times* dan *The London Times* yang lahir pada tahun 1907 dengan Ibu berdarah Rusia dan Ayah yang berdarah Belanda. Namanya Oscar Mohr yang pada tahun 1948, ia menjabat sebagai anggota delegasi Belanda ke Dewan Keamanan di Paris. Oscar Mohr kemudian dikirim ke Jakarta untuk membangun hubungan dengan tujuan



Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. NIT. No Tentang jalinan kerja sama Yayasan kerja sama kebudayaan Belanda, Suriname, dan Antilen.

mendapatkan persetujuan pemerintah Indonesia dalam membangun Cabang *Sticusa* di Indonesia pada tahun 1947. Di Indonesia sendiri pada saat itu, beberapa orang seperti Perdana Menteri Sjahrir, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Sekretaris Jendral Kementrian Penerangan Soebandrio memiliki pandangan dan gagasan sama untuk menjalin hubungan kerja sama budaya dengan negara lain.⁴

Oscar Mohr memiliki tujuan untuk mengamati dan mempelajari cara kerja yang dilakukan orang Indonesia dalam proses membangun kerja sama tersebut. Ia menyimpulkan bahwa mereka mendapatkan persetujuan untuk membangun sebuah cabang yang berpusat di Jakarta, namun hal tersebut juga mendapatkan pertentangan dan sentimen negatif terhadap hal tersebut. Para kaum intelektual Indonesia yang menolak hal tersebut memiliki pandangan bahwa hal yang dilakukan oleh Belanda tersebut merupakan upaya kolonisasi baru yang dicoba untuk diterapkan oleh Belanda. Beberapa orang tersebut menganggap Mohr sebagai eksponen sistem kolonial Belanda. Meskipun begitu, Yayasan kebudayaan ini tetap dijalankan walaupun mendapatkan berbagai kritikan dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah tindakan pemborosan dana. Yayasan Kerja Sama Kebudayaan ini banyak melakukan kegiatan yang menghasilkan karya dan penggiat seni budaya baru di Indonesia. Mereka bahkan mengundang beberapa seniman Indonesia untuk melakukan pertukaran budaya di Belanda atau kantor pusat *Sticusa* di Amsterdam.⁵



Jennifer Lindsay, Maya H.T. Liem. *Heirs to World Culture: Being in, 1950-1965*. Brill. Hlm 62-63

Ibid. hlm 64-65.

Dalam pembentukan Sticusa cabang Indonesia, pihak Belanda sudah mencoba jalur diplomasi dengan mengirimkan utusannya ke Indonesia. Stichting Culture voor Samenwerking (Sticusa) atau Yayasan Kerjasama Budaya merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah Belanda untuk menjalin sebuah kerja sama yang berfokus pada kebudayaan antara beberapa negara.⁶ Yayasan ini didirikan pada 26 februari 1948 di Trippenhuis Amsterdam.⁷

Yayasan ini dipimpin oleh beberapa orang yang terbagi atas 2 bagian, yaitu dewan dan dewan bantuan. Prof Dr J.H.A Logemann menjabat sebagai pimpinan atau ketua dari yayasan ini dari tahun 1948-1952, Prof. C. Berg sebagai wakil ketua dengan masa jabatan yang sama dengan ketuanya dan masih banyak lagi yang menjadi bagian dari struktur yayasan ini. Dewan yayasan ini terdiri dari tujuh hingga sembilan orang, begitu pula juga dengan jumlah anggota yang ada di dewan pembantu. Verhoeven menjabat sebagai Direktur Utama yayasan ini.⁸

Yayasan Kerjasama Kebudayaan ini banyak melahirkan kegiatan seperti pertunjukan seni, film, sastra, dan bentuk kesenian lainnya serta menerbitkan beberapa majalah dan bahkan buku. Selain karya-karya yang membawa pengetahuan baru bagi perubahan kebudayaan yang ada di Indonesia, Yayasan ini

⁶ Karabinos, MJ. *The shadow continuum : testing the records continuum model through the Djogdja Documenten and the migrated archives*. Universiteit Leiden Netherlands. 2015. Hlm 71

⁷ National Archief: Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap: oegang: 2.19.114

National Archief: Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap: oegang: 2.19.114



juga melahirkan banyak seniman dan intelektual yang dikirim ke negeri Belanda untuk belajar tentang kesenian seperti Amir Pasaribu, Baharuddin Marasutan, Hendra Goenawan, Mochtar Bachtiar, Sitor Situmor, Sutan Sjahrir, Roeslan Abdoelgani, Haji Agus Salim, Moh. Said Reksohadiprodjo, Moh. Roem dan Moh. Sjafei. Pada kenyataannya, yayasan ini berperan penting pada perkembangan budaya populer yang terjadi di sekitar tahun 1950-an. Perkembangan budaya modern secara signifikan terlihat sangat jelas dengan munculnya bioskop, tempat pertunjukan seni, toko-toko busana, dan lain sebagainya. Di Makassar sendiri mengalami kasus yang sama di tahun 1950-an.⁸

Seperti namanya “Yayasan Kerjasama Kebudayaan”, yayasan ini berfokus pada kerja sama di bidang kebudayaan.⁹ Ada begitu banyak kegiatan yang dirancang guna menopang pertukaran negara antara negara-negara yang terlibat didalamnya. Yayasan ini dijalankan dengan berfokus pada 3 hal antara lain mensubsidi pusat kebudayaan pada bagain pemerintahan yang menjalin kerja sama, bantuan materi, dan bantuan teknis, serta penyediaan ahli budaya. Kegiatan seperti teater, musik, tari, film, sastra, dan lain sebagainya menjadi kegiatan utama yang didukung penuh oleh Yayasan ini.¹⁰

Walaupun Yayasan Kerjasama Kebudayaan ini cukup berpengaruh dalam perkembangan budaya modern di Indonesia, yayasan ini mendapatkan kritikan dari berbagai intelektual dan beberapa orang di pemerintahan Indonesia yang



⁸ Jenniver Lindsay, *Op. Cit.* Hlm 66-68.

Karabinos, *Op. Cit.* Hlm 5.

National Archief: Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap:
toegang: 2.19.114

menganggap bahwa yayasan ini merupakan sebuah bentuk dari Belanda agar dapat memberi pengaruh pada kekuasaannya yang setelah kemerdekaan tidak begitu kuat dan berpengaruh. Sticusa diyakini dibangun dengan tujuan membangun kerja sama budaya antar beberapa negara untuk melakukan perkembangan kebudayaan dan bukan sebagai bentuk legitimasi agar Belanda tetap memiliki kekuasaan dan kekuatan politik di Indonesia.¹¹ Hal ini menegaskan bahwa Sticusa mendapatkan izin dari pihak Indonesia untuk membangun yayasannya melalui diplomasi atau kesepakatan dan juga menegaskan bahwa Yayasan Kebudayaan Indonesia Timur telah dibentuk Belanda yang berpusat di Makassar.¹²

Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur yang dimaksud sebenarnya di bentuk oleh Negara Indonesia Timur dengan tujuan dan cita-cita yang sama dengan dibentuknya Sticusa. Yayasan ini resmi didirikan pada 5 maret 1949 yang dibuka dengan pidato oleh Presiden NIT, Sukawati. Sama halnya dengan Sticusa, Yayasan ini juga membentuk sebuah panitia persiapan pembentukan dengan mengumpulkan berbagai sumberdaya yang akan menjadi penopang dari Yayasan ini.¹³ E. Katoppo, Mr. B. van Eijk, Thio Heng Sioe, M. N. W. Lengoh, Dr. M Amir, Abdurrahim, J.

¹¹ Deventer dagblad (terbitan tanggal 17-01-1953) *Bapak F. Mulder*

¹² Het Parool pada tanggal 19-10-1956

¹³ Buku saku Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur yang dibagikan

kepada seluruh peserta acara peresmian Yayasan ini. Berisi tentang pidato presiden



visi dan tujuan dari Lembaga, serta semacam anggaran administrasi dan anggaran.

J. van Dijk, J. C. Krijgsman, dan Prof. dr. C. de Heer menjadi orang-orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pembentukan Yayasan ini.¹⁴

Pada 23 Desember 1948, Dr F. R. J. Verhoeven selaku direktur utama Sticusa menyurat ke J. J. van Dijk selaku Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan Makassar dengan tujuan untuk memberitahukan tentang pertemuan yang ingin diselenggarakan oleh direktur Verhoeven. Verhoeven mengutarakan niatnya yang ingin membentuk atau membangun jalinan kerja sama kebudayaan dengan wilayah Indonesia Timur yang di mana Makassar akan dijadikan sebagai pusatnya. Verhoeven juga menunjuk tuan Wudewen yang akan diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil alih manajemen pembentukan *Sticusa* cabang Makassar.¹⁵

Sticusa yang secara tidak langsung berpengaruh atas perkembangan budaya di Indonesia Timur terutama di Makassar menjalin kerja sama dengan Yayasan Kebudayaan Indonesia Timur ini. *Sticusa* memberikan dukungan dan dorongan dari segi materi maupun non materi. Bahkan diawal berdirinya Yayasan ini, sticusa memberikan kontribusi berupa uang sebesar f 50.000 yang ditujukan untuk membantu perlengkapan ruangan kantor, pertunjukan, dan juga perpustakaan.¹⁶

Bahkan dalam acara peresmian yang dilaksanakan di Fort Rotterdam pada tanggal 5 Maret 1949, direktur Sticusa Dr. F. R. J. Verhoeven menghadiri acara tersebut dan dalam pidato yang disampaikan olehnya menegaskan bahwa kedua Yayasan



Ibid. Hlm 15

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. NIT
Jenniver Lindsay, *Op. Cit.* Hlm 21

dengan segenap kekuatannya senantiasa akan terus mendorong dan memajukan kebudayaan dalam bentuk Kerjasama antar kedua Yayasan.¹⁷

Dapat dilihat bahwa tahun 1950-an atau setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari Belanda merupakan suatu periode yang teramat rumit dikarenakan banyaknya perubahan dan perkembangan yang bergerak dengan cepat di berbagai bidang yang ada. Dalam bidang kebudayaan sendiri menjadi suatu studi yang amat menarik, bagaimana Sticusa ini kemudian membawa pengaruh terhadap Indonesia baru yang lebih modern (mengikuti pola barat). Sebelumnya, pemerintah Hindia Belanda pernah menjalankan kegiatan-kegiatan yang menopang perkembangan kebudayaan di Hindia Belanda. Sebuah kegiatan Non-Pemerintah yaitu Lingkaran-Lingkaran Budaya (*Kunstkringen*) yang pertama didirikan di Batavia 1901 dan kemudian merebak ke kota-kota lainnya.¹⁸ Lingkaran Budaya ini melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan konser-konser dari musisi dan seniman dari Eropa, bahkan bentuk-bentuk kesenian lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Mengapa Belanda membangun Yayasan Kerjasama Kebudayaan di Indonesia?
- b. Bagaimana hubungan kerja sama kebudayaan yang dibangun antara Sticusa dan Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur?



Jenniver Lindsay, *Op. Cit.* Hlm 39-40

Furnivall. *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Freedom Jakarta. 2009

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebagai acuan pada ruang penelitian. Pembatasan fokus pembahasan mampu membantu penulis dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan penelitian. Ada dua point yang biasanya di jadikan sebagai batasan dalam penelitian yaitu batasan temporal dan spasial.

a. Batasan Temporal

Penelitian ini mengambil rentang waktu dari tahun 1949-1951. Tahun 1949 menjadi tahun awal penelitian dikarenakan pada tahun tersebut Sticusa sudah mulai aktif secara langsung dan memberikan pengaruh pada kebudayaan modern yang berkembang di Indonesia, walaupun Sticusa sendiri telah terkonsepkan pada tahun 1948 namun realisasi yang berjalan baru bisa terlaksanakan pada tahun 1949 setelah Sutan Syahrir dan Moh Hatta bersepakat atas kerja sama kebudayaan tersebut. Sementara tahun 1951 menjadi tahun akhir dari penelitian ini dikarenakan Sticusa Indonesia berhenti beroperasi atau melakukan Kerjasama dengan Indonesia Timur dikarenakan ketegangan politik yang terjadi terutama di wilayah Indonesia, terutama terjadi perubahan pada bentuk negara yang mempengaruhi sebagian besar kebijakan yang berlaku pada saat itu. Bahkan jalinan kerja sama kebudayaan antara Sticusa dan Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur baru terlaksana pada saat Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur diresmikan pada tanggal 5 Maret



spasial

Penelitian ini berfokus pada wilayah Makassar yang pada saat periode tersebut, wilayah ini dijadikan sebagai sentral untuk wilayah Indonesia Timur.

1.4 Tujuan dan Manfaat Peneitian

1. Tujuan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- b. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan kerja sama kebudayaan yang terjadi di Makassar melalui Sticusa.

2. Manfaat

- a. Dapat memahami hubungan antara Sticusa dan perkembangan budaya melalui kerja sama kebudayaan di Makassar.
- b. Dapat memberikan wawasan secara mendalam terkait kerja sama kebudayaan di Makassar melalui Sticusa.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian yang Relevan

Liesbeth Dolk dalam buku *Heirs to World Culture; Being Indonesian 1950-1965*, menjelaskan tentang bagaimana kemudian Sticusa memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap meluasnya kebudayaan barat dan menjadi kebudayaan populer diberbagai kalangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Sticusa memberi sumbangan besar kepada banyak seniman yang telah terlibat dalam kegiatan terutama dalam program pertukaran yang telah dilakukan. Namun, Liesbeth hanya menjelaskan pengaruh Sticusa secara umum yang dilihat dari pengaruh Sticusa cabang Jakarta saja, sementara wilayah bogor yang menjadi konsulat dan Makassar yang juga menjadi cabang Indonesia Timur saat itu tidak terjelaskan. Padahal pengaruh yang diberikan oleh yayasan ini terutama di wilayah Makassar cukup besar dan mampu melahirkan berbagai nama seniman yang memiliki pengaruh besar sebagai kiblat para seniman lainnya di Makassar.

Dalam narasi yang ada dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana dinamika yang terbangun antara pihak Indonesia dan Belanda mencoba mendirikan sebuah yayasan kerja sama budaya (Sticusa). Oscar Mohr yang menjadi utusan Belanda dikirim ke Jakarta untuk melakukan diplomasi kepada pemimpin-pemimpin Indonesia pada Januari 1949. Walaupun sebelum mengirimkan Oscar Mohr, Belanda telah melakukan perbincangan mengenai hal ini, namun aan yang dilakukan sebelumnya masih sangat terbatas hingga Belanda i mengirim utusannya kembali. Hingga pada akhirnya apa yang dilakukan



oleh Mohr membuahkan hasil dan membuat Sticusa cabang Jakarta, Makassar, dan sebuah konsulat di Bogor. Keberhasilan ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa orang penting di Indonesia yang melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan untuk melarutkan Indonesia dalam kebudayaan yang lebih modern seperti Kolonel Gatot Subroto yang bersahabat dengannya, Sutan Syahrir, dan lain sebagainya yang kemudian menjadi orang-orang yang pertama kali dikirim ke Belanda untuk melakukan pertukaran kebudayaan di sana.

Di Jakarta, sebuah bangunan yang kemudian dijadikan sebagai kantor atau gedung utama untuk Sticusa ini di bangun dan kemudian dikenal dengan naman Het Stichinghuis yang beralamat di Jln. Gadjah Mada No. 13, Jakarta. Di bangunan inilah Yayasan kebudayaan tersebut melakukan berbagai kerja sama budaya untuk perkembangan kebudayaan yang modern di Indonesia. Ada begitu banyak seniman muda yang berhasil di tarik oleh Mohr untuk menjadi bagian dari Sticusa ini, seperti Amir Pasarabu, Hamzah Daeng Mangemba, Rivai Apin, Haji Agus Salim, dan lainnya.

Sticusa membawa begitu banyak pengaruh kebudayaan dalam berbagai aspek dan bidang. Ada begitu banyak buku, film, karya tulis, dan lainnya yang menjadi produksi utama dalam hubungan kerja sama yang telah di bangun. Bahkan di beberapa tahun setelah didirikannya Sticusa cabang Indonesia ini, perkembangannya terus meningkat pesat walaupun situasi politik yang terjadi

esia pada saat itu sangat berpengaruh dengan jalannya yayasan ini. politik terus dilayangkan karena beberapa pihak menganggap Sticusa alat yang digunakan Belanda untuk terus mempertahankan legitimasi



kekuasaannya di Indonesia.

Buku Tod Jones. *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan*. Pada bagian atau BAB 3 tulisan ini dengan sub judul “Dari Regulasi Budaya ke Kepemimpinan Budaya: Perubahan Penggunaan Budaya dalam Demokrasi Konstitusional (1950-1957) dan Demokrasi Terpimpin (1957-1965) membahas tentang bagaimana kondisi politik dalam negeri dan luar negeri mampu mempengaruhi sebuah kebudayaan yang sedang berjalan. Setiap pemimpin memiliki pandangan dan polanya tersendiri dalam mengatur sebuah persoalan. Kebudayaan menjadi hal penting terutama dalam identitas sebuah kelompok, maka dari itu sebuah kebijakan yang memperhatikan dan berfokus pada kebudayaan sangat diperlukan.

Buku ini membahas tentang bagaimana sebuah kebudayaan erat kaitannya dengan politik dan kekuasaan yang ada. Di Indonesia sendiri, campur tangan penguasa dalam mempolitikasi sebuah kebudayaan sangat marak bahkan hal ini disebut sebagai politik kebudayaan. Hal ini terjadi karena beberapa orang maupun kelompok tertentu menganggap bahwa kebudayaan dapat digunakan sebagai alat politik yang cukup memiliki pengaruh besar.

Tod Jones dalam bukunya membahas tentang Kebudayaan dan di Indonesia. Ia menjelaskan tentang bagaimana sebuah penelitian kebudayaan dapat berpengaruh terhadap berbagai hal yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan sebuah kebudayaan. Ia menganggap bahwa sebuah

kebudayaan dapat menjadi sangat berbahaya karena bisa saja ilkan sebuah implikasi politik yang tak dapat dipungkiri nantinya.



Praktik-praktik kebudayaan dianggap sebagai salah satu tonggak yang mampu memperkuat atau mempertahankan sebuah heirarki politik. Hal ini dapat diartikan bahwa kebudayaan bisa saja digunakan sebagai alat untuk memperpanjang, memperkuat, serta menekankan kekuasaan suatu individu maupun kelompok yang menggunakannya.

Penelitian tentang bentuk kerja sama tiap-tiap kelompok kebudayaan yang memiliki sejarah yang cukup berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya sebuah kebudayaan disuatu wilayah menjadi sangat penting. Dengan hal tersebut kita dapat melihat bagaimana dua atau lebih sebuah organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan melakukan diplomasi dan bekerja sama dengan tujuan memajukan sebuah kebudayaan atau saling mempelajari budaya satu sama lain dari kelompok tersebut.

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian relevan yang digunakan sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian ini. Yang membedakan antara penelitian sebelumnya terletak pada focus batasan spasial yang dipersempit untuk melihat bagaimana pola dan pengaruh kebudayaan yang terbentuk dari hasil kerja sama antara Sticusa dan Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur.

1.5.2 Landasan Konseptual.

Definisi kebudayaan menurut para ahli bisa bervariasi tergantung pada sudut pandang dan disiplin ilmu yang digunakan. Berikut adalah

beberapa definisi dari para ahli:



B. Tylor: Salah satu definisi klasik tentang kebudayaan datang dari

Edward B. Tylor pada abad ke-19. Menurutnya, kebudayaan adalah "keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat."

2. Franz Boas: Boas, seorang antropolog terkenal, melihat kebudayaan sebagai "produk dari interaksi manusia dengan lingkungannya." Baginya, kebudayaan adalah hasil dari proses sosial dan historis yang kompleks.
3. Clifford Geertz: Geertz, seorang antropolog interpretatif, menggambarkan kebudayaan sebagai "sistem simbol-simbol yang diinterpretasikan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari." Baginya, kebudayaan adalah pola makna yang diterapkan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku mereka.
4. Bronislaw Malinowski: Seorang antropolog fungsionalis, Malinowski berpendapat bahwa kebudayaan adalah "sistem yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam konteks sosial dan lingkungan." Menurut pandangannya, kebudayaan membantu manusia beradaptasi dan bertahan dalam lingkungannya.
5. Marshall McLuhan: Seorang sarjana media, McLuhan memperluas konsep kebudayaan ke dalam apa yang ia sebut sebagai "global village." Baginya, kebudayaan tidak hanya terbatas pada aspek tradisional seperti bahasa dan adat istiadat, tetapi juga mencakup pengaruh teknologi dan media massa yang membentuk cara kita berpikir dan berinteraksi.



Tentang kebudayaan Indonesia, para ahli kebudayaan Indonesia sendiri memberikan banyak perspektif dan analisis yang berbeda. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli kebudayaan Indonesia:

1. **Koentjaraningrat:** Salah satu ahli kebudayaan Indonesia yang sangat dihormati, Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan Indonesia adalah "sistem gagasan, tindakan, dan produk manusia yang merupakan hasil dari interaksi manusia dengan alam dan sesamanya yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan manusia dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu."
2. **Prof. Dr. Saparinah Sadli:** Beliau menggambarkan kebudayaan Indonesia sebagai "keseluruhan pola pikir, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman oleh anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupannya."
3. **Dr. Haryati Soebadio:** Haryati Soebadio mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia adalah "keseluruhan pola kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala aspeknya yang mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, seni, bahasa, dan pemikiran."
4. **Prof. Dr. Moerdowo:** Profesor Moerdowo mengemukakan bahwa kebudayaan Indonesia adalah "hasil budaya dari proses sosial yang terus berubah dan

ang, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa a."



5. **Prof. Dr. Soedarsono:** Beliau menggambarkan kebudayaan Indonesia sebagai "pola perilaku, kepercayaan, nilai-nilai, adat istiadat, seni, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia." Dari berbagai pandangan para ahli tersebut, kita dapat melihat bahwa kebudayaan Indonesia dilihat sebagai sesuatu yang kompleks, terdiri dari beragam aspek mulai dari kebiasaan hidup, adat istiadat, seni, bahasa, hingga nilai-nilai dan pemikiran yang menjadi identitas masyarakat Indonesia.

Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang terbentuk oleh interaksi antara manusia, lingkungan, serta kepercayaan. Bahkan untuk kebudayaan yang bersifat modern terbentuk atas interaksi

1.6 Metode Penelitian

1. Heuristik:

Dalam melakukan penelitian terlebih pada penelitian sejarah, metode heuristik atau pengumpulan sumber sangat diperlukan sebagai langkah awal sebuah penelitian. Peneliti atau penulis diharuskan mengumpulkan sumber primer maupun sekunder terlebih dahulu sebelum melangkah ke metode penelitian selanjutnya.

2. Kritik Sumber:

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, peneliti kemudian harus melakukan kritik terhadap ng didapatkannya. Kritik ini terbagi menjadi dua cara yaitu kritik intern dan kritik ritik intern ialah kritik yang ditujukan pada isi yang ada atau disampaikan dalam



sumber (arsip dokumen, foto, laporan, dan sumber lainnya), sedangkan kritik ekstern merupakan kritik yang ditujukan pada fisik sumber yang dapat dilihat dari bentuk atau wujud sumber tersebut.

3. Interpretasi

Setelah melakukan pengumpulan sumber dan melakukan kritik pada sumber yang telah dikumpulkan, peneliti kemudian diharuskan menyusun sumber yang ada secara sistematis agar memudahkan peneliti melihat kekurangan dan kelebihan sumber yang dimiliki untuk memulai penulisan atau tahap akhir dari metode penelitian.

4. Historiografi:

Setelah melakukan tiga metode awal diatas, penulis kemudian akan melakukan proses penulisan berlandaskan metodologi penulisan sejarah. Hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam penulisan ini ialah cara penulisan, pemaparan data, serta laporan hasil penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada BAB ini, penulis membahas tentang latar belakang dari tulisan yang akan dibuat, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian, serta sistematika penelitian. BAB ini diharapkan menyampaikan secara garis besar point-point yang akan menjadi pokok pada BAB-BAB selanjutnya.



BAB II : Kebijakan Kebudayaan di Indonesia pasca Kemerdekaan

Bagian ini menggambarkan tentang kebijakan-kebijakan yang muncul terkait Kebudayaan di Indonesia terutama pada periode pasca kemerdekaan

BAB III : Masuknya Sticusa di Indonesia

Bagian ini membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia dan Belanda membangun hubungan kerja sama kebudayaan melalui Sticusa yang kemudian secara perlahan melakukan kontak Kerjasama dengan Indonesia

BAB IV : Kerjasama Sticusa dan Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur

BAB ini membahas tentang proses masuknya atau meluasnya pengaruh Sticusa di Indonesia dengan membuka cabang kantornya di Makassar yang mana pada saat itu Makassar dianggap sebagai sentral dari wilayah Indonesia Timur. Serta membahas tentang bagaimana Sticusa mempengaruhi kebudayaan orang-orang kota Makassar menjadi sebuah kebudayaan yang bersifat kebarat-baratan pada saat itu

BAB V : Kesimpulan

BAB ini akan menggabungkan tiap-tiap topik pembahasan pada BAB-BAB sebelumnya. Mulai dari bagaimana kebijakan kebudayaan kemudian mempengaruhi terjalinnya hubungan kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan Belanda hingga kemudian Sticusa memberikan dampak yang cukup besar kepada

ngan kebudayaan modern di Indonesia terkhusus di Makassar yang fokus penelitian dari penulis.



BAB II

KEBIJAKAN DAN KONDISI KEBUDAYAAN DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN HINGGA 1950-AN.

Kebudayaan merupakan sebuah bentuk kebiasaan sebuah kelompok yang terpolarisasi dan disepakati bersama. Namun kebudayaan terbilang terbatas pada definisi tersebut. Kebudayaan tidak terbatas pada konsep yang sederhana dan mengalir begitu saja pada tindakan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya merupakan sebuah bentuk abstrak yang didasari oleh pikiran dan perasaan yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain.¹⁹

Konsep kebudayaan menjadi sebuah pembahasan yang tak pernah terputus dan tidak ada akhirnya untuk terus menjadi sebuah topik penting. Kebudayaan dapat dikatakan sebagai segala hal yang dibawa oleh angin (kebudayaan merupakan pengetahuan yang terus mengalir dan hidup serta lahir dari interaksi yang dilakukan oleh manusia). Definisi ini masih sangat luas dan abstrak untuk menggambarkan tentang bagaimana kebudayaan itu seutuhnya. Namun untuk sementara ini, definisi tersebutlah yang paling tepat kita gunakan untuk mengidentifikasi sebuah kebudayaan.

Dalam sebuah kelompok kecil maupun besar (bahkan sebuah negara), sebuah kebudayaan menjadi suatu hal yang cukup penting dikarenakan budaya dijadikan sebagai identitas bersama. Maka dari itu, ide-ide kebudayaan biasanya muncul dari kalangan masyarakat yang kemudian disepakati bersama menjadi kebudayaan dan identitas sebuah kelompok. Namun di Indonesia, ada begitu banyak kepentingan diberbagai bidang yang mengakibatkan seringnya terjadi kekeliruan dalam merumuskan sesuatu. Dalam kasus



yang kita ketahui sekarang tentang kebudayaan Indonesia merupakan budaya

Dr. Mukhlis PaEni. *Mengeja Indonesia*. Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta. 198-79

murni yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu tidak sepenuhnya benar. Dalam proses pembentukan kebijakan kebudayaan yang dirancang untuk membentuk identitas bangsa melalui kebudayaan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor luar dari negara lain yang masih mempunyai kepentingan.²⁰

Kebudayaan menjadi sebuah kekuatan dan sebagai simbol identitas sebuah negara, maka dari itu beberapa hal yang menjadi perhatian utama pemerintah pasca kemerdekaan Indonesia ialah kebijakan yang berhubungan dengan kebudayaan seperti kebijakan penguatan identitas nasional dengan mendorong pelestarian terhadap berbagai jenis kebudayaan tradisional, pembentukan lembaga kebudayaan, perdebatan politik kebudayaan, Pendidikan berbasis kebudayaan, serta kebijakan Bahasa yang menjadi identitas sebuah bangsa. Hal-hal tersebut tentu memerlukan kajian mendalam serta dukungan yang kuat sebagai awal membentuk identitas bangsa Indonesia hingga beberapa orang pemerintahan seperti Syahrir dan Hatta memikirkan berbagai cara serta mencari peluang kerja sama dengan pihak-pihak tertentu.²¹

Sebuah kebudayaan dapat dijadikan sebagai suatu alat yang penting dalam menentukan identitas sebuah kelompok bahkan negara yang dalam artian bahwa kebudayaan merupakan sebuah alat negara yang mempunyai legitimasi pada identitas negara. Sebagai sebuah alat negara, kebudayaan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapat hingga

²⁰ Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak sepenuhnya melepaskan genggamannya di tanah Indonesia. Belanda menganggap bahwa mereka merupakan yang mempunyai legitimasi yang kuat di Indonesia dikarenakan pernah ada dalam waktu yang cukup lama. Dalam proses pembentukan identitas , Belanda melakukan banyak campur tangan sehingga misalnya banyak lahir dikarenakan pengaruh yang dibawa oleh bangsa Belanda. icklefs. *Sejarah Idonesia Modern 1200-2004*. Sermbi. Jakarta. 2007. Hlm



membangun kualitas hidup masyarakat dengan diberlakukannya sebuah kebijakan kebudayaan.²²

Dalam negara, terutama Indonesia, kebudayaan masyarakat yang dikenal beragam dan luas itu menjadi sebuah pengetahuan yang menjadi bekal dalam membentuk identitas negara melalui kebudayaan. Namun di Indonesia terjadi sebuah fenomena yang cukup begitu banyak orang yang tidak merasakan hal tersebut. Hal tersebut ialah tentang bagaimana orang-orang Indonesia melihat, belajar, dan berinteraksi dengan budaya itu sendiri. Kerap kali kita mengklaim bahwa kebudayaan kita telah mengalami kemajuan yang signifikan padahal sebenarnya kita mengejar kebudayaan modern yang belum sepenuhnya tercapai sementara kita telah meninggalkan kebudayaan (pengetahuan) yang ada di masa lalu. Hal ini membuktikan bahwa kita mengejar-ngejar masa depan yang kita impikan tetapi kita sendiri belum sepenuhnya selesai dengan apa yang ada di masa lalu.

Identitas kebudayaan sangat diperlukan oleh suatu bangsa untuk memahami bagaimana bangsa itu sendiri, sehingga menjadi sangat penting bagi suatu negara untuk membangun sebuah identitas kebudayaan dalam pembangunan bangsa. Walaupun menjadi bagian penting dalam membangun sebuah bangsa, akan tetapi kebudayaan acap kali dipinggirkan dan dianggap sebagai suatu hal yang kurang penting oleh sebagian besar masyarakat bahkan pemerintah Indonesia pada saat itu. Hingga pada akhirnya di awal tahun 1950 hingga 1960-an mulai banyak orang atau kelompok seperti kelompok politik (partai) yang memberi perhatian lebih terhadap kebudayaan, bahkan didalam beberapa partai politik berdiri berbagai lembaga kebudayaan karena mulai menganggap bahwa kebudayaan merupakan salah satu kekuatan politik yang cukup penting.²³



ies. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama
ja Masa Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2015. Hlm 28
Lindsay, Maya H.T. Liem. *Heirs to World Culture: Being Indonesian, 1950-*

Ada begitu banyak faktor internal maupun eksternal yang kemudian mempengaruhi pembentukan identitas kebudayaan Indonesia. Salah satu faktor eksternal yang paling berpengaruh ialah warisan budaya atau kebiasaan yang telah diadaptasi atau diwariskan oleh bangsa Kolonial Belanda. Apa yang telah dibangun sebelumnya oleh bangsa kolonial tentu saja bukan hal yang mudah untuk melupakan atau melepaskannya begitu saja, sehingga sampai saat ini masih ada berbagai hal yang berjalan dan tetap dipertahankan oleh pemerintah Indonesia seperti sistem tata ruang kota, arsitektur bangunan, dan lain sebagainya.

Adanya pengaruh dari penguasa lama (kolonial Belanda yang pernah menduduki Indonesia dalam waktu yang lama) menjadi salah satu faktor penentu utama corak kebudayaan Indonesia, ditambah juga dengan hasil perjanjian Linggarjati yang menekankan bahwa Belanda harus membantu negara jajahan (Indonesia) untuk membentuk identitas bangsa melalui kebudayaan.²⁴

Untuk mengidentifikasi kebijakan pada awal kemerdekaan dapat di pisahkan menjadi 2 bagian, yaitu pada masa demokrasi Konstitusional dan demokrasi terpimpin. Bentuk pemerintahan pada masa demokrasi Konstitusional dapat dikatakan sebagai bentuk negara yang diadopsi dari bentuk pemerintahan liberal gaya barat.²⁵ Pada periode ini telah diadakan sebuah konvensi kebudayaan yang menjadi ruang awal untuk menentukan rumusan kebijakan budaya di Indonesia. Konferensi ini diadakan di tahun 1948 dan 1954 yang dihadiri oleh berbagai elit politik dan budaya. Selain itu, pada masa yang sama, dibawah Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan beberapa kongres kebudayaan secara bertahap di tahun 1948 dan 1954.



ies. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama
Masa Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2015. Hlm 9-

m 87-88

Kebijakan Kebudayaan tentu saja tidak lepas dari pengaruh pemerintah yang bersinggungan secara langsung dengan bidang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memegang peranan penting dalam menentukan arus kebijakan kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya keterhubungan tersebut, maka yang perlu diidentifikasi untuk mengetahui tentang lahirnya kebijakan kebudayaan adalah siapa saja yang memberikan pengaruh didalamnya terutama dari pihak yang berkuasa. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian Menteri Pendidikan dan kebudayaan seperti Ki Hadjar Dewantara (agustus 1945 – November 1945), Todung Sutan Gunung Mulia (November 1945 – Maret 1946), Mohammad Sjafei (Maret 1946 – Oktober 1946), Soewndi (Oktober 1946 – Juni 1947), Goenarso (Oktober 1946 – Juni 1947), Ali Sastroamidjojo (Juli 1947 – Agustus 1949), Teuku Moehammad Hasan (1948-1949),²⁶ dan beberapa orang Menteri lainnya yang tentu saja tiap-tiap kepemimpinannya memiliki kepentingan dan ide yang berbeda tentang bagaimana membentuk identitas kebudayaan Indonesia melalui kebijakan kebudayaan yang diberlakukan.

Pasca kemerdekaan Indonesia 1945, ada begitu banyak hal yang perlu dibangun dan diperhatikan secara mendalam oleh pemerintah pada saat itu. Politik, ekonomi, social, dan budaya menjadi hal-hal yang krusial untuk membangun wajah baru Indonesia setelah merebut kemerdekaannya dari kedudukan Belanda. Bahkan selama pasca kemerdekaan, Indonesia masih tidak bisa lepas dari bayang-bayang negara kolonial Belanda yang masih mempunyai legitimasi kekuasaan di beberapa wilayah Indonesia. Menanggapi hal tersebut dan untuk merebut kemerdekaan seutuhnya, Indonesia mengusung beberapa perjanjian dengan Belanda seperti perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1947-1948), dan Konferensi Meja



dalam dua perjanjian tersebut ada beberapa point yang ditekankan seperti

snan, dkk. *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-1949*. Jakarta. 2018. Hlm 15-81.

penarikan pasukan tantara Belanda yang masih tersebar di beberapa wilayah di Indonesia hingga Belanda ditugaskan untuk membantu Indonesia dalam membentuk identitasnya sebagai negara yang baru saja merdeka.²⁷

Tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun berbagai hal sebagai pondasi sebuah negara, mulai dari berbagai kebijakan hingga sistem-sistem pemerintahan yang akan diterapkan selanjutnya. Secara perlahan Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam struktur politik, sosial, dan budaya akibat peralihan dari kolonialisme Belanda ke pemerintahan baru.²⁸

Pada bagian kebudayaan, pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai hal untuk mengubah serta mendorong berbagai kebijakan kebudayaan sebagai landasan untuk pengembangan kebudayaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 1954 menjadi titik awal dari kebijakan kebudayaan yang akan dibentuk dan di teruskan. Selain itu, dalam UUD 1945 dalam pasal 32 menegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia” yang menjadi komitmen awal pemerintah terhadap pengembangan kebudayaan.²⁹

Salah satu UUD RIS (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat) 1949 yang dibentuk di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo menegaskan bahwa: Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.³⁰ Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan bahwa di tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah difokuskan untuk membentuk identitas kebudayaan sebagaimana mestinya sebagai identitas sebuah negara atau bangsa.



Undang Dasar 1945, Pasal 32.

Lindsay, *Op. Cit.* Hlm 7

Undang Dasar 1945, Pasal 32.

es, *Op. Cit.* Hlm 87

Kebijakan kebudayaan di Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk dan memajukan identitas budaya nasional bangsa. Periode tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan kebudayaan Indonesia ke depan dengan fokus pelestarian seni dan budaya daerah, pendidikan kebudayaan, serta pengakuan terhadap keberagaman budaya seluruh nusantara.

Periode pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an merupakan periode dimana Indonesia mengalami berbagai macam konflik. Sebagai negara yang baru saja merdeka, ada begitu banyak tantangan yang harus direspon dengan cermat dan hati-hati oleh pemerintah Indonesia. Kebudayaan yang merupakan salah satu hal penting untuk dibangun sebagai negara baru tidak begitu mendapatkan perhatian sejak awal dikarenakan konflik yang berkepanjangan perihal wilayah Indonesia. Tahun 1948, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa bagian kecil dari wilayah yang ada saat ini, namun di tengah kekacauan yang terjadi pada masa itu pemerintah menggelar sebuah Kongres Kebudayaan yang pertama di Magelang. Hal ini kemudian menjadi pemicu awal bahwa kebudayaan merupakan sebagai bagian penting bagi suatu negara untuk membentuk identitas negara itu sendiri.³¹

Berbagai percobaan dilakukan pemerintah Indonesia dalam membangun bentuk negara untuk menentukan arah kebijakan kedepannya seperti demokrasi terpimpin, negara parlemen, dan lain sebagainya. Alisjahbana yang merupakan salah satu budayawan Indonesia menganalisis dan membagi tentang pola kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu Pra-Indonesia dan Indonesia. Pada masa Pra-Indonesia, ia melihat kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan yang tradisional, statis, terikat oleh tradisi, dan terbelah-belah. Sementara

esia, ia melihat kebudayaan Indonesia mengalami perubahan yang cukup



signifikan dan masih sangat berpengaruh hingga saat ini. Ia memberikan gambaran bahwa kebudayaan Indonesia setelah merdeka menjadi kebarat-baratan, dinamis, bebas, dan Bersatu di mana hal tersebut dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang lebih modern dari barat itu sendiri.³² Dengan adanya dua pandangan tentang pola kebudayaan tersebut sangat berdampak pada proses pembentukan identitas kebudayaan Indonesia di mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki ragam corak kebudayaan dari masa lampau hingga pada saat ini, namun Sebagian besar kebudayaan tersebut sudah mulai bergeser dari keasriannya dikarenakan berbagai pengaruh yang ada sehingga sangat sulit untuk menunjukkan yang mana identitas kebudayaan Indonesia yang sebenarnya.³³

Bentuk dari kebijakan kebudayaan lainnya yang dapat dilihat maupun dirasakan secara langsung yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti seminar kebudayaan, diskusi kebudayaan, pertunjukan seni, ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat luas dan lainnya yang merupakan imbas langsung dari sebuah kebijakan yang diberlakukan pada periode tertentu itu. Tod Jones menyebut hal tersebut sebagai salah satu perspektif dari empat perspektif yang dapat digunakan untuk melihat sebuah kebijakan kebudayaan dalam suatu negara.³⁴ Perspektif ini secara tidak langsung mengatakan bahwa seni merupakan gambaran dari kebudayaan itu sendiri.³⁵ Hal tersebut lah yang kemudian menjadi alasan adanya perspektif yang dikatakan oleh Tod Jones dalam melihat sebuah kebijakan kebudayaan yang lahir di Indonesia. Salah satu hal lain yang mempengaruhi kebijakan kebudayaan di Indonesia yaitu berkembangnya pola kapitalisme yang mempengaruhi pola konsumen masyarakat Indonesia. Dalam proses membangun dan mempertahankan keanekaragaman Indonesia, pola konsumsi

³² Tod Jones, *Op. Cit.* Hlm 61-63



jeze dan Henk Schulte Nordholt, *Politik Kebudayaan Indonesia 1945–1950*, LIPI, 2009), hlm. 75–78.

es, *Op. Cit.* Hlm 11

yaan atau bahkan kebijakan kebudayaan dapat dilihat dari pertunjukan seni tradisional yang di pertontonkan. Kebijakan kebudayaan memiliki pengaruh implementasi dan praktik kebudayaan di dalam masyarakat sebuah negara.

menjadi suatu hal yang penting sebagai pembeda sekaligus alat untuk penyebarluasan mobilitas sosial didalam masyarakat.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia di bagi dalam beberapa periodisasi terutama pada dua periodisasi penting yaitu masa kolonial dan postkolonial. Kedua periode tersebut memiliki alurnya masing-masing dalam menjalankan kepemimpinan sebuah negara dengan menggunakan sistem politik yang berbeda yang mempengaruhi kebijakan yang berlaku didalamnya. Lebih spesifik lagi, dalam membangun kebijakan kebudayaan Indonesia terutama pada masa postkolonial, pemerintah cenderung membangun kebijakan kebudayaan berdasarkan asas demokrasi liberal yang membiarkan masyarakatnya memilih sesuatu sesuai dengan pilihannya yang bertanggungjawab atas pilihan itu sendiri sehingga dalam hal kebijakan kebudayaan menjadi cenderung tidak begitu terikat dan memberatkan bagi masyarakat.³⁶

Pada masa postkolonial tersebut, walaupun kebijakan kebudayaan yang berlaku tidak begitu terikat dan memberatkan dalam mengatur pola kebudayaan masyarakat Indonesia, akan tetapi tetap saja pemerintah tetap saja ingin mengoperasikan kebijakan kebudayaan sebagai media yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat dengan membangun keterlibatan berbagai individu dalam kegiatan budaya. Maka dari itu, Indonesia dalam periode postkolonial ini menggunakan dua alat kebijakan budaya. Pertama yaitu, kebijakan kebudayaan otoritarian yang berarti sebuah negara memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab terhadap kebijakan kebudayaan yang diberlakukan untuk masyarakat Indonesia. Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam membimbing dan mengatur negara dalam menjalankan kebudayaannya sendiri.



Alat pertama ini menjadikan pemerintah sebagai acuan utama penentu alur dan bobot kebudayaan yang akan dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah memegang kendali penuh dalam menumbuh-kembangkan kebudayaan di Indonesia dan memiliki kecenderungan untuk mengintervensi sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan jika tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah lah yang menjadi peran utama dalam menentukan dinamika kebudayaan dalam versi yang telah mereka tentukan.

Alat kebudayaan yang kedua yaitu model budaya komando. Alat ini tak jauh berbeda dengan alat pertama yang secara penuh dikontrol dan di atur langsung oleh pemerintah. Perbedaan alat pertama dan kedua terletak pada pola pengaturan dan campur tangan langsung oleh pemerintah itu sendiri. Model komando ini mengambil pola yang mengikuti mode pasar yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Model ini menggambarkan bahwa masyarakat sebagai konsumen dan kebudayaan sebagai sebuah produk pasar yang disebarluaskan. Dalam model ini, bukan pemerintah saja yang menjadi pusat dalam kebijakan kebudayaan, tetapi masyarakat yang di artikan sebagai konsumen juga merupakan pusat dari model ini.³⁷

Dengan begitu banyaknya pemikiran yang berkembang untuk membawa kebudayaan Indonesia kearah yang sebagaimana mestinya, terdapat berbagai pertentangan antara dua pemikiran utama, yaitu antara kaum yang memikirkan tentang kebudayaan modern di mana bangsa Indonesia harus lepas dari bayang-bayangan kebudayaan yang terjadi di masa lalu serta kaum yang melihat kebudayaan dari masa lalu sebagai identitas asli bangsa Indonesia yang dalam artian sebagai identitas pribumi.³⁸



Dengan lahirnya perbedaan pemikiran yang cukup mendasar tersebut, pada masa awal kemerdekaan, beberapa intelektual dan seniman Indonesia mencoba mengkaji dan memikirkan ulang tentang bagaimana kebudayaan Indonesai yang semestinya untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal tersebut menjadi cukup rumit untuk memutuskan bagaimana kebudayaan Indonesia di bentuk dikarenakan pola masyarakat modern yang kian meningkat sehingga modern menjadi suatu hal yang harus dijadikan tujuan oleh semua masyarakat negara. Memang benar bahwa jaman modern menjadi impian berbagai orang dan harus diterapkan di kehidupan itu sendiri, namun hal-hal yang telah di bangun dan menjadi acuan kehidupan masyarakat dari sejak dulu kala tidak bisa digantikan dan dilupakan begitu saja. Nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam kebudayaan orang-orang jaman dahulu atau kebudayaan tradisioanal mengajarkan banyak hal tentang makna kehidupan antara sesama manusia dan lingkungan manusia itu sendiri. Untuk itu, berbagai kebijakan mulai dimunculkan oleh pemerintah Indonesai dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Kebudayaan yang bersifat modern memang penting akan tetapi peninggalan masalalu yang menjadi cikal bakal bangsa ini menjadi perhatian yang cukup diperhitungkan. Dengan adanya pertimbangan tersebut lahirlah kebijakan kebudayaan yang mengarahkan kebudayaan tradisional yang dimodifikasi sedemikian rupa melalui pertukaran budaya menjadi budaya modern dengan tidak menghilangkan nilai dan makna yang terkandung didalam kebudayaan tersebut.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat menarik untuk dikaji sejarahnya, terutama pada wilayah Makassar yang menjadi sentral wilayah untuk wilayah Indonesia Timur. Makassar menjadi jantung perkotaan dengan pola pertumbuhan di



sosial, budaya, dan politik yang sangat cepat. Bahkan pada masa colonial ar menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan status afdeling yang ada secara administratif antara wilayah. Pihak Belanda menjadikan Makassar

sebagai pusat Pendidikan, Kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya yang menjadikan Makassar mendapatkan status administratif tersebut.

Salah satu hal yang penting lainnya tentang Makassar yaitu terletak pada kajian sejarahnya yang cukup menarik dan berperan penting hingga saat ini. Namun selama pasca kemerdekaan, masih banyak sejarah di Makassar yang belum terkaji dan bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kebanyakan orang. Hal tersebut disebabkan karena rumitnya pergolakan yang terjadi di Makassar pasca kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, negara Indonesia menggunakan beberapa sistem negara seperti serikat dan demokrasi terpimpin, serta demokrasi konstitusional³⁹

Makassar merupakan salah satu wilayah di Indonesia, terutama Indonesia Timur yang dijadikan sebagai titik awal mulainya penyebaran budaya barat yang modern oleh bangsa-bangsa barat terutama Belanda. Adaptasi masyarakat Makassar terhadap kebiasaan warga Belanda yang sebelum kemerdekaan Indonesia menduduki Makassar dalam waktu yang lama memicu timbulnya pola kebiasaan baru dalam berbagai hal.

Pengaruh Belanda masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Makassar bahkan setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya, Campur tangan Belanda masih tetap berputar dalam pemerintahan NIT (Negara Indonesia Timur) yang kemudian menjadi polemik dalam politik karena Belanda dianggap masih menginginkan beberapa wilayah di Indonesia untuk menjadi wilayah kolininya.

Perlu kita garis bawahi bahwa pada periode pasca kemerdekaan hingga tahun 1950 merupakan masa yang sangat penting bagi Indonesia dalam membangun identitas negara



negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut juga berlaku pada arah yang bangsa Indonesia dari berbagai bidang tertentu, salah satunya bidang

kebudayaan yang akan menjadi identitas penting bagi sebuah bangsa. Awal kemerdekaan Indonesia merupakan periode yang penting dalam membangun berbagai kebijakan negara terutama kebijakan kebudayaan. Kebijakan kebudayaan mengalami berbagai perkembangan yang berhubungan erat dengan proses konsolidasi negara dan pembentukan identitas nasional.





Optimized using
trial version
www.balesio.com